

# TINGKAT KEMISKINAN KOTA CIMAHI 2013

<https://cimahikota.bps.go.id>



**BADAN PUSAT STATISTIK  
KOTA CIMAHI**



## Kata Pengantar

Kemiskinan merupakan persoalan mendasar dan menjadi perhatian serius dari pemerintah. Analisis data yang berkaitan dengan kemiskinan belum banyak tersedia dalam rangka mendukung strategi penanggulangan kemiskinan di Kota Cimahi. Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Cimahi akan berusaha setiap tahunnya menyajikan data dan informasi kemiskinan serta faktor faktor yang terkait berdasarkan hasil survei.

Buku "Analisis Kemiskinan Kota Cimahi Tahun 2013" ini merupakan publikasi yang berisi data dan informasi mengenai kemiskinan serta indikator/variabel lain yang terkait dengan isu kemiskinan untuk tingkat Kota Cimahi dan Bandung Raya serta Provinsi Jawa Barat. Data dan informasi yang tersaji dalam publikasi ini adalah hasil penghitungan BPS RI berdasarkan hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) gabungan triwulan I s.d. IV tahun 2013.

Diharapkan publikasi ini dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan semua pihak yang berkepentingan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Akhirnya, saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan sumbangsih dalam penyelesaian buku ini. Kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan dan kesempurnaan publikasi yang akan datang.

Cimahi, 27 November 2015

Kepala BPS Kota Cimahi

Drs. H. Agus Praptono, M.Stat  
NIP. 19660802 199401 1001



## Daftar Isi

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
Apakah Kemiskinan Itu ? .....	1
Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Kota Cimahi .....	3
Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan .....	6
Konsumsi Kalori .....	7
Indikator-indikator Lain .....	9
Lampiran 1. Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat, Tahun 2013 .....	14
Lampiran 2. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2013 .....	15
Lampiran 3. Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2013 .....	16
Lampiran 4. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2013 .....	17
Lampiran 5. Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Pekerjaan, Tahun 2013 .....	18
Lampiran 6. Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2013 .....	19
Lampiran 7. Persentase Perempuan Pengguna Alat KB dan Balita di Rumah Tangga Miskin yang Proses Kelahirannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 .....	20
Lampiran 8. Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, Tahun 2013 .....	21

---

Lampiran 9.	Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota dan Luas Lantai Perkapita, Tahun 2013 .....	22
Lampiran 10.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2013 ...	23
Lampiran 11.	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2013 .....	24
Lampiran 12.	Persentase Rumah Tangga yang Mendapatkan Instrumen Penanggulangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2013 .....	25
Lampiran 13.	Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin dan Rata-rata Beras Raskin yang Diperoleh Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013 .....	26

## Apakah Kemiskinan Itu ?

Kemiskinan merupakan masalah yang sudah ada sejak dahulu kala dan bisa dikatakan akan tetap menjadi kenyataan yang harus dihadapi pada tahun-tahun yang akan datang. Masalah kemiskinan muncul karena adanya sekelompok orang yang memiliki peluang lemah dalam kegiatan ekonomi. Mereka tidak memiliki kemampuan yang memadai untuk memenuhi hak-hak dasarnya dalam rangka mengembangkan kehidupan yang lebih layak. Hak-hak tersebut antara lain : terpenuhinya kebutuhan pangan, terpenuhinya kebutuhan kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, juga terpenuhinya rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan terpenuhinya hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Akibatnya mereka menjadi kelompok yang terpinggirkan dalam persaingan mencari nafkah dan kepemilikan aset produktif, sehingga semakin lama semakin tertinggal. Kondisi ini akhirnya makin mempersempit akses kelompok masyarakat ini terhadap sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya yang seharusnya dapat menjadi modal bagi mereka untuk produktif dan mampu mengangkat taraf kehidupannya. Pada titik ini akhirnya kebanyakan orang miskin akan mewariskan kemiskinannya pada generasi selanjutnya sehingga terjebak dalam lingkaran kemiskinan (*vicious circle of poverty*) yang berkepanjangan. Karena itulah pemerintah negara manapun menjadikan kemiskinan sebagai salah satu persoalan mendasar dan selalu mendapatkan pusat perhatian.

Secara konseptual, kemiskinan diukur dengan membandingkan tingkat pendapatan orang atau rumah tangga dengan tingkat pendapatan yang diperlakukan sebagai standar penilaian. Dari sisi ini kemiskinan dibedakan menjadi dua, yakni kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut.

**Kemiskinan relatif** menggunakan standar penilaian relatif yaitu dengan membandingkan tingkat pendapatan individu atau rumah tangga dengan standar penilaian yang ditetapkan secara subyektif oleh masyarakat setempat dan bersifat lokal. Mereka yang berada di bawah standar tersebut dikategorikan sebagai miskin secara relatif. Sebagai contoh pada masyarakat Nusa Tenggara Barat yang lebih klasik, kepemilikan kuda adalah standar penilaian yang berlaku. Orang yang tidak memiliki kuda dianggap termasuk orang miskin. Bila kita membagi penduduk berdasarkan urutan pendapatan kemudian memfokuskan perhatian terhadap 20 persen atau 40 persen penduduk pada lapisan terendah, maka kelompok masyarakat dengan pendapatan terendah ini pun merupakan penduduk relatif miskin. Dengan demikian, ukuran kemiskinan relatif sangat tergantung pada distribusi pendapatan/pengeluaran penduduk.

Seorang dikatakan **miskin secara absolut** apabila tingkat pendapatannya lebih rendah daripada tingkat pendapatan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum baik berupa makanan maupun non makanan. Tingkat pendapatan untuk memenuhi kebutuhan dasar ini biasanya dicerminkan oleh suatu garis kemiskinan. BPS sendiri mendefinisikan garis kemiskinan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar berupa asupan kalori sebesar 2100 kkal/hari per kapita, yang disebut garis kemiskinan makanan, ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang yaitu perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan, transportasi, dan kebutuhan individu/rumahtangga dasar lainnya, yang disebut garis kemiskinan non makanan.

### **Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Kota Cimahi**

Pengukuran kemiskinan secara absolut lebih umum dilakukan oleh pemerintah agar dapat membandingkan tingkat kemiskinan di suatu daerah dengan daerah lain, juga agar perbandingan dapat dilakukan secara internasional. Oleh sebab itu BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, jumlah penduduk miskin biasanya dilihat berdasarkan seberapa banyak penduduk dengan tingkat pendapatan/pengeluaran dibawah garis kemiskinan. Garis Kemiskinan (GK) sendiri terdiri dari dua bagian yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM). GKM merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll). GKNM adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non-makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Rincian mengenai GK, GKM, dan GKNM di Kota Cimahi pada Tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 1 berikut. Sumber data utama yang dipakai adalah data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Tahun 2008-2013.

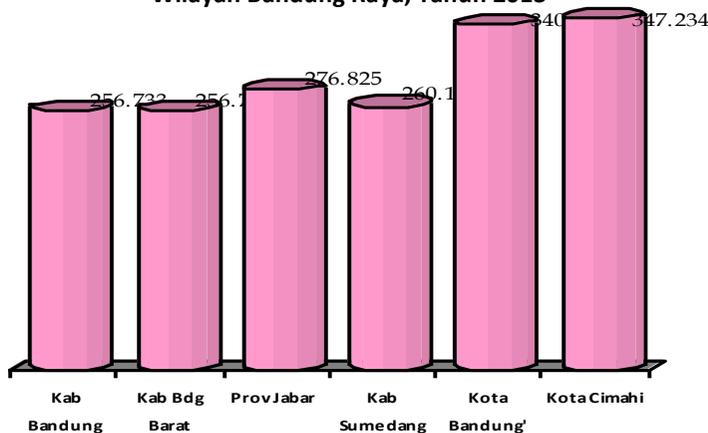
**Tabel 1. Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin Kota Cimahi, Tahun 2008-2013**

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kapita/Bln)	Perubahan Garis Kemiskinan (%)	Persentase Penduduk Miskin (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
2008	258.213	-	8,35
2009	262.440	1,64	7,10
2010	280.155	6,75	7,40
2011	293.143	4,64	7,15
2012	306.733	4,64	6,67
2013	347.234	13,20	5,63

Sumber : BPS RI, diolah dari data Susenas Tahun 2008-2013

Pada kolom (2), tampak bahwa GK terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Namun kenaikan tersebut tidak selalu stabil. Kenaikan tertinggi terjadi pada Tahun 2013 yang mencapai 13,20 persen (meningkat dari Rp 306.733,- pada Tahun 2012 menjadi Rp 347.234,- pada Tahun 2013). Sementara kenaikan terendah terjadi pada periode 2008-2009 sebesar 1,64 persen. Hal ini disebabkan adanya pengaruh inflasi umum (IHK – Indeks Harga Konsumen) yang turut dimasukkan ke dalam proses penghitungan GK. Seperti yang diketahui inflasi sangat mempengaruhi daya beli masyarakat.

**Gambar 1. Garis Kemiskinan (Rp) Kabupaten/Kota di Wilayah Wilayah Bandung Raya, Tahun 2013**



Sumber : BPS RI, diolah dari data Susenas Tahun 2013

Untuk mengetahui GK Provinsi Jawa Barat dan kabupaten/kota di sekitar Kota Cimahi, kita dapat melihat Gambar 1 di atas.

GK Kota Cimahi ternyata menduduki tempat teratas dibanding daerah lain di sekitarnya. Artinya penghasilan minimal yang harus dimiliki untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup di Kota Cimahi termasuk paling mahal bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lain di wilayah Bandung Raya.

Seperti disebutkan sebelumnya, pada Tahun 2008 GK Kota Cimahi adalah Rp 258.213,- per kapita per bulan dan Tahun 2013 telah mencapai Rp 347.234,- per kapita per bulan. Artinya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya baik berupa makanan maupun non makanan, seseorang yang tinggal di Kota Cimahi pada Tahun 2008 harus mempunyai penghasilan minimal sebesar Rp 258.213,-. Sementara pada Tahun 2013, penghasilan minimal itu meningkat menjadi Rp 347.234,- per orang. Seseorang yang memiliki penghasilan di bawah Rp 258.213,- pada Tahun 2008 dan Rp 347.234,- pada Tahun 2013 dikategorikan sebagai penduduk miskin. Walaupun terjadi kenaikan pada GK di Kota Cimahi, patut disyukuri bahwa persentase penduduk miskin justru mengalami penurunan.

Pada Tahun 2008, penduduk Kota Cimahi yang termasuk dalam kategori miskin ini adalah sebesar 8,35 persen. Pada tahun-tahun selanjutnya persentase ini terus menurun (Tabel 1 kolom (4)) hingga mencapai 5,63 persen pada Tahun 2013. Selayaknyalah prestasi ini dipertahankan bahkan terus ditingkatkan oleh Pemerintah Kota Cimahi.

Untuk membandingkan Kota Cimahi dengan wilayah Bandung Raya, kita dapat melihat pada Gambar 2 di bawah.

Persentase penduduk miskin Pada Tahun 2013 di Kota Cimahi ternyata termasuk cukup rendah (5,63 persen) karena berada di bawah rata-rata Provinsi

Jawa Barat (9,61 persen). Di wilayah Bandung Raya, Kota Cimahi berada di tempat kedua setelah Kota Bandung.

**Gambar 2. Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Wilayah Bandung Raya. Tahun 2013**



Sumber : BPS RI, diolah dari data Susenas Tahun 2013

### Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan

Selain persentase penduduk miskin yang berada di bawah GK, ada 2 indikator kemiskinan lain yang didasarkan pada pendekatan kebutuhan dasar, yaitu Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index – P<sub>1</sub>*) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index – P<sub>2</sub>*). Selain menekan jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan seharusnya juga sekaligus mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan.

Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Sementara itu, Indeks Keparahan Kemiskinan merupakan ukuran tingkat ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks maka semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin.

**Gambar 3. Indeks Kedalaman ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan ( $P_2$ ) Kemiskinan Kota Cimahi, Tahun 2008 – 2013**



Sumber : BPS RI, diolah dari data Susenas Tahun 2008-2013

Walaupun berfluktuasi, Indeks Kedalaman tampak menunjukkan tren menurun dari tahun ke tahun. Bahkan pada Tahun 2011 indeks ini telah mencapai nilai 0,91 walaupun kemudian mengalami sedikit kenaikan pada Tahun 2012 dan kembali menurun di 2013. Tren menurun ini menyatakan bahwa rata-rata penghasilan penduduk miskin tidak lagi separah sebelumnya dan menjadi semakin mendekati garis kemiskinan. Sementara, Indeks Keparahan juga menunjukkan tren menurun pada periode 2008-2013. Artinya kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin juga makin mengecil walaupun sedikit.

**Tabel 2. Indeks Kedalaman ( $P_1$ ) dan Indeks Keparahan ( $P_2$ ) Kemiskinan Kabupaten/Kota di Wilayah Bandung Raya, Tahun 2013**

Kab/Kota	$P_1$	$P_2$
(1)	(2)	(3)
<b>Kab Bandung</b>	1,13	0,25
<b>Kab Sumedang</b>	1,48	0,32
<b>Kab Bandung Barat</b>	2,29	0,64
<b>Kota Bandung</b>	0,48	0,08
<b>Kota Cimahi</b>	1,09	0,29
<b>Prov Jawa Barat</b>	1,65	0,44

Sumber : BPS RI, diolah dari data Susenas Tahun 2013

di kedua kota ini termasuk cukup kecil bila dibandingkan daerah lain di Bandung Raya, bahkan juga di Provinsi Jawa Barat.

### Konsumsi Kalori

Indikator lain yang dapat menunjukkan tingkat kemiskinan secara absolut selain GK adalah tingkat kecukupan gizi yang dihitung berdasarkan kandungan kalori dan protein makanan yang dikonsumsi penduduk. Besarnya konsumsi kalori dan protein dihitung dengan mengkonversikan kuantitas makanan yang dikonsumsi kedalam kalori atau protein setiap komoditas makanan yang dikonsumsi kemudian dijumlahkan.

Berdasarkan Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) 2004, angka kecukupan energi/kalori penduduk Indonesia adalah 2000 kkal per orang per hari. Sedangkan angka kecukupan protein berdasarkan WNPG 2004 tersebut dipatok sebesar 52 gram per orang per hari.

Tabel 2 di samping memperlihatkan bahwa di lingkup Bandung Raya, Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kota Cimahi juga termasuk cukup rendah walaupun masih di bawah Kota Bandung. Artinya kedalaman kemiskinan dan kesenjangan pendapatan antar penduduk miskin

**Tabel 3. Persentase Penduduk Wilayah Bandung Raya dengan Tingkat Konsumsi Energi Per Kapita Per Hari Di Bawah 2000 Kkal, Tahun 2011-2013**

Kab/Kota	2012	2013
(1)	(2)	(3)
Kab Bandung	65,98	62,17
Kab Sumedang	50,50	46,62
Kab Bandung Barat	83,05	87,27
Kota Bandung	69,10	75,09
Kota Cimahi	69,17	71,00

Sumber : BPS RI, diolah dari data Susenas Tahun 2013

Dari hasil olah data Susenas Tahun 2012 dan 2013 Modul Konsumsi pada Tabel 3 di atas, terlihat bahwa sebagian besar penduduk wilayah Bandung Raya tingkat konsumsi energinya masih di bawah 2.000 kilokalori, hanya Kabupaten Sumedang yang persentasenya dibawah 50 persen. Hal ini menjadi sangat menarik bila kita mengingat bahwa persentase penduduk miskin di wilayah Bandung Raya tidak mencapai angka 15 persen. Dengan kata lain, penduduk yang termasuk dalam kategori tidak miskin pun ternyata masih mengalami kekurangan konsumsi kalori. Dua hal yang bertolak belakang ini menunjukkan bahwa terdapat kesalahan dalam pemilihan menu makanan sehari-hari oleh masyarakat hingga makanan yang dikonsumsi ternyata tidak dapat memenuhi kebutuhan kalornya. Fakta ini sudah seharusnya menjadi perhatian pemerintah baik daerah maupun pusat untuk diteliti lebih lanjut mengingat pangan dan gizi adalah investasi besar bagi generasi mendatang.

#### Indikator-indikator Lain

Selain berbagai indikator yang disajikan secara statistik, cara utama yang paling sering dipakai untuk mengenali penduduk miskin adalah dengan mengetahui kondisi perumahannya. Di sisi lain, kondisi perumahan yang tidak layak menunjukkan masih adanya ketimpangan dalam pemenuhan hak atas pemukiman yang layak. Tempat tinggal yang sehat dan layak masih menjadi kebutuhan yang sulit dijangkau oleh masyarakat miskin.

Secara umum, masalah yang dihadapi masyarakat miskin dalam kaitannya dengan perumahan dan fasilitasnya adalah ketersediaan air minum layak, sanitasi layak dan perumahan kumuh.

Dalam Susenas, rumah tangga yang menjadi responden dikelompokkan berdasarkan sumber air minum utama yang dipakai yaitu air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, sumur bor/pompa, sumur terlindung, sumur tak terlindung, mata air terlindung, mata air tak terlindung, air sungai, air hujan dan lainnya. Menurut kriteria yang dipakai dalam MDG's (*Millenium Development Goals*) rumah tangga yang memiliki akses terhadap air minum layak adalah rumah tangga dengan sumber air minum utama berasal dari leding, air hujan, dan sumur bor/pompa, sumur terlindung, serta mata air terlindung dengan jarak 10 m atau lebih dari tempat penampungan kotoran. Bila rumah tangga tersebut menggunakan air kemasan baik bermerk maupun isi ulang, rumah tangga tersebut dikategorikan sebagai tidak memiliki akses terhadap air minum.

**Tabel 4. Persentase Penduduk Miskin dan Persentase Rumah Tangga dengan Air Minum Layak Di Wilayah Bandung Raya, Tahun 2012-2013**

Kab/Kota	Persentase Penduduk Miskin 2013	Persentase Rata Air Minum Layak	
		2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab Bandung	8,05	25,70	32,36
Kab Sumedang	11,62	48,48	48,48
Kab Bandung Barat	12,98	35,54	37,76
Kota Bandung	4,46	31,85	26,32
Kota Cimahi	6,48	20,26	22,52

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Tahun 2013

Pada Tabel 4 di atas, terlihat hal yang menarik. Di Kabupaten Sumedang dan Bandung Barat yang memiliki persentase penduduk miskin paling tinggi di antara daerah lain di Bandung Raya, persentase rumah tangga dengan air minum layak juga menempati posisi tertinggi. Bila diperhatikan lebih seksama pada Tabel 5 di bawah, ternyata di kedua kabupaten tersebut penduduknya lebih banyak menggunakan mata air terlindung dan sumur terlindung sebagai sumber air minum mereka. Sementara di ketiga daerah lain air isi ulang paling banyak dipakai sebagai sumber air minum.

**Tabel 5. Persentase Rumah Tangga Menurut Sumber Air Minum di Wilayah Bandung Raya, Tahun 2013**

Kab/Kota	Sumber Air Minum Utama						Total
	Air kemasan Bermerk	Air Isi Ulang	Sumur Bor/Pompa	Sumur Terlindung	Mata Air Terlindung	Lainnya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Kab Bandung	6,29	32,41	15,22	19,15	20,95	5,98	100,00
Kab Sumedang	4,09	6,82	6,28	24,32	28,99	29,5	100,00
Kab Bdg Barat	1,66	8,97	8,48	29,02	33,70	18,17	100,00
Kota Bandung	27,34	35,97	13,86	5,42	4,61	12,8	100,00
Kota Cimahi	15,06	45,77	19,73	6,29	8,38	4,77	100,00

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Tahun 2013

Masyarakat miskin biasanya menghadapi masalah buruknya sanitasi dan lingkungan pemukiman. Padahal kedua hal tersebut sangat berpengaruh terhadap perkembangan kesehatan mereka terutama ibu dan anak-anak. Di lain pihak, masyarakat miskin sendiri kurang memahami pengelolaan sanitasi dan lingkungan hidup sebagai bagian dari perilaku hidup sehat.

Dalam Susenas, rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak adalah rumah tangga yang memiliki fasilitas buang air besar sendiri atau bersama, dengan jenis kloset leher angsa dan tangki septik sebagai tempat pembuangan akhir kotoran. Persentase diatas didapat dengan membagi jumlah rumah tangga sampel yang memiliki sanitasi layak dengan jumlah rumah tangga sampel seluruhnya.

**Tabel 6. Persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak Di Wilayah Bandung Raya, Tahun 2012-2013**

Kab/Kota	Persentase Penduduk Miskin 2013	Persentase Ruta Sanitasi Layak	
		2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab Bandung	8,05	58,24	59,58
Kab Sumedang	11,62	79,39	78,50
Kab Bandung Barat	12,98	47,38	49,71
Kota Bandung	4,46	43,47	39,50
Kota Cimahi	6,48	68,06	78,23

Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Tahun 2013

Di Kota Cimahi persentase rumah tangga dengan sanitasi layak telah cukup tinggi. Begitu juga dengan daerah lain di Bandung Raya. Akan tetapi sebagai duta sanitasi selayaknyalah prestasi ini bisa ditingkatkan agar nantinya dapat terwujud Kota Cimahi yang sehat dan indah.

Dari uraian diatas tentang kriteria rumah tangga dengan akses air minum layak dan sanitasi layak dan dengan menambahkan mengenai luas lantai hunian dan bangunan rumah yang layak maka bisa didapatkan informasi mengenai rumah tangga kumuh berupa persentase. Persentase rumah tangga kumuh didapatkan dengan memberikan bobot penimbang kepada masing-masing kriteria tersebut. Besarnya bobot penimbang yang diberikan adalah sebagai berikut :

1. Rumah tangga yang memiliki akses air minum layak diberikan bobot penimbang sebesar 15 persen.
2. Rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak diberikan bobot penimbang sebesar 15 persen.
3. Rumah tangga dengan luas lantai hunian per orang lebih besar dari 7,2 m2 diberikan bobot penimbang sebesar 35 persen.
4. Rumah tangga yang memiliki bangunan rumah yang layak diberikan bobot penimbang sebesar 35 persen.

Hasil dari penghitungan rumah tangga kumuh adalah sebagai berikut.

**Tabel 7. Persentase Rumah Tangga Kumuh Di Wilayah Bandung Raya, Tahun 2012-2013**

Kab/Kota	Persentase Penduduk Miskin 2012	Persentase Penduduk Miskin 2013	Persentase Rata Kumuh	
			2012	2013
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
<b>Kab Bandung</b>	8,32	8,05	20,94	16,31
<b>Kab Sumedang</b>	11,85	11,62	13,17	8,83
<b>Kab Bandung Barat</b>	13,33	12,98	15,13	15,93
<b>Kota Bandung</b>	4,55	4,46	23,93	23,19
<b>Kota Cimahi</b>	6,67	6,48	23,48	17,07

*Sumber : BPS, diolah dari data Susenas Tahun 2012-2013*

Rumah tangga kumuh tampaknya memang lebih banyak berada di wilayah perkotaan seperti Kota Cimahi dan Kota Bandung. Meskipun rumah tangga miskin di kedua kota itu cukup rendah (6,48 % dan 4,46 %) tetapi persentase rumah tangga kumuhnya ternyata cukup tinggi (17,07 % dan 23,19 %) dibandingkan daerah lain. Kedua kota ini masih harus terus membenahi wajah kotanya agar menjadi tempat hunian yang lebih nyaman bagi warganya.

### Lampiran 1.

Indikator Kemiskinan Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat,  
Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Garis Kemiskinan (Rp per kapita per bulan)	Persentase Penduduk Miskin (P <sub>0</sub> )	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P <sub>1</sub> )
(1)	(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>276,825</b>	<b>9.61</b>	<b>1.65</b>
1	Bogor	271,970	9.54	1.39
2	Sukabumi	240,188	9.24	1.50
3	Cianjur	264,580	12.02	1.70
4	Bandung	256,733	7.94	1.13
5	Garut	226,308	12.79	1.73
6	Tasikmalaya	237,114	11.57	1.47
7	Ciamis	270,515	8.62	1.28
8	Kuningan	261,858	13.34	2.09
9	Cirebon	300,990	14.65	2.09
10	Majalengka	353,727	14.07	2.24
11	Sumedang	260,160	11.31	1.48
12	Indramayu	350,455	14.99	2.02
13	Subang	272,854	12.35	1.69
14	Purwakarta	271,270	9.28	1.41
15	Karawang	335,273	10.69	1.55
16	Bekasi	361,510	5.20	0.77
17	Bandung Barat	256,789	12.92	2.29
18	Kota Bogor	360,518	8.19	1.13
19	Kota Sukabumi	411,523	8.05	1.17
20	Kota Bandung	340,355	4.78	0.48
21	Kota Cirebon	334,439	10.54	1.11
22	Kota Bekasi	449,026	5.33	0.73
23	Kota Depok	443,302	2.32	0.26
24	Kota Cimahi	347,234	5.63	1.09
25	Kota Tasikmalaya	337,841	17.19	2.57
26	Kota Banjar	250,311	7.11	1.33

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

## Lampiran 2.

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas  
Menurut Kabupaten/Kota dan Pendidikan yang Ditamatkan, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	< SD	Tamat SD/ SLTP	SLTA+
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>29.70</b>	<b>62.99</b>	<b>7.32</b>
1	Bogor	48.41	48.49	3.10
2	Sukabumi	26.81	68.84	4.36
3	Cianjur	32.83	64.85	2.32
4	Bandung	19.94	73.74	6.32
5	Garut	32.15	65.25	2.60
6	Tasikmalaya	16.66	81.09	2.25
7	Ciamis	17.30	76.38	6.32
8	Kuningan	14.61	75.34	10.06
9	Cirebon	44.68	47.35	7.97
10	Majalengka	27.08	66.66	6.26
11	Sumedang	21.20	71.35	7.45
12	Indramayu	36.93	53.64	9.43
13	Subang	36.17	57.29	6.54
14	Purwakarta	41.35	52.66	6.00
15	Karawang	39.69	55.70	4.61
16	Bekasi	34.72	59.41	5.87
17	Bandung Barat	12.15	81.90	5.95
18	Kota Bogor	21.30	50.08	28.62
19	Kota Sukabumi	26.45	63.41	10.14
20	Kota Bandung	12.46	74.51	13.03
21	Kota Cirebon	34.37	42.47	23.16
22	Kota Bekasi	21.56	52.38	26.06
23	Kota Depok	10.42	60.65	28.93
24	Kota Cimahi	7.40	70.46	22.14
25	Kota Tasikmalaya	7.15	81.76	11.09
26	Kota Banjar	17.51	73.59	8.90

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

### Lampiran 3.

Angka Melek Huruf dan Angka Partisipasi Sekolah Penduduk Miskin  
Menurut Kabupaten/Kota dan Golongan Umur, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Angka Melek Huruf		Angka Partisipasi Sekolah	
		15-24 th	15-55 th	7-12 th	13-15 th
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>98.55</b>	<b>95.53</b>	<b>95.54</b>	<b>75.39</b>
1	Bogor	97.21	89.08	90.28	64.98
2	Sukabumi	100.00	98.20	97.77	82.02
3	Cianjur	99.34	97.43	94.64	71.86
4	Bandung	100.00	99.66	100.00	79.25
5	Garut	98.65	98.26	94.77	69.33
6	Tasikmalaya	96.09	98.43	94.37	79.30
7	Ciamis	100.00	97.92	92.73	68.40
8	Kuningan	95.97	97.41	92.32	88.87
9	Cirebon	95.16	87.44	94.96	73.20
10	Majalengka	100.00	95.91	100.00	95.72
11	Sumedang	100.00	97.97	97.44	95.58
12	Indramayu	100.00	93.14	99.08	79.29
13	Subang	100.00	92.13	100.00	89.13
14	Purwakarta	100.00	96.82	91.93	60.74
15	Karawang	98.60	94.40	95.14	76.87
16	Bekasi	100.00	94.82	91.96	47.25
17	Bandung Barat	100.00	99.78	95.85	69.10
18	Kota Bogor	100.00	96.65	95.50	77.73
19	Kota Sukabumi	99.01	99.12	100.00	67.20
20	Kota Bandung	100.00	100.00	98.01	100.00
21	Kota Cirebon	100.00	93.34	97.70	76.57
22	Kota Bekasi	94.47	98.86	100.00	84.80
23	Kota Depok	100.00	100.00	100.00	100.00
24	Kota Cimahi	100.00	99.77	100.00	68.68
25	Kota Tasikmalaya	100.00	100.00	92.59	74.38
26	Kota Banjar	97.34	99.14	96.95	91.66

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

### Lampiran 4.

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Status Bekerja, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja *)	Bekerja di Sektor Informal	Bekerja di Sektor Formal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>45.30</b>	<b>39.72</b>	<b>14.98</b>
1	Bogor	47.81	32.75	19.45
2	Sukabumi	49.12	42.54	8.34
3	Cianjur	41.50	49.80	8.70
4	Bandung	38.19	37.52	24.28
5	Garut	42.46	46.47	11.07
6	Tasikmalaya	37.40	49.14	13.45
7	Ciamis	34.90	53.39	11.71
8	Kuningan	47.50	40.50	12.00
9	Cirebon	51.47	36.06	12.46
10	Majalengka	33.30	54.44	12.26
11	Sumedang	39.27	53.26	7.47
12	Indramayu	50.19	43.23	6.59
13	Subang	44.30	44.42	11.29
14	Purwakarta	40.75	46.06	13.19
15	Karawang	51.57	42.02	6.39
16	Bekasi	53.42	27.96	18.62
17	Bandung Barat	52.12	32.71	15.17
18	Kota Bogor	47.91	15.27	36.82
19	Kota Sukabumi	45.69	31.87	22.44
20	Kota Bandung	46.08	28.88	25.04
21	Kota Cirebon	50.61	32.83	16.56
22	Kota Bekasi	42.73	25.04	32.23
23	Kota Depok	40.13	33.57	26.30
24	Kota Cimahi	50.37	27.87	21.75
25	Kota Tasikmalaya	48.16	25.77	26.08
26	Kota Banjar	45.62	31.13	23.26

\*) termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

### Lampiran 5.

Persentase Penduduk Miskin Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota dan Sektor Pekerjaan, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Tidak Bekerja*)	Bekerja di Sektor Pertanian	Bekerja Bukan di Sektor Pertanian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>45.30</b>	<b>21.90</b>	<b>32.80</b>
1	Bogor	47.81	15.71	36.49
2	Sukabumi	49.12	21.42	29.46
3	Cianjur	41.50	37.48	21.01
4	Bandung	38.19	25.93	35.87
5	Garut	42.46	34.64	22.91
6	Tasikmalaya	37.40	29.97	32.63
7	Ciamis	34.90	36.50	28.59
8	Kuningan	47.50	27.24	25.26
9	Cirebon	51.47	15.93	32.60
10	Majalengka	33.33	29.21	37.49
11	Sumedang	39.27	33.17	27.57
12	Indramayu	50.19	23.32	26.50
13	Subang	44.30	36.45	19.25
14	Purwakarta	40.75	26.16	33.09
15	Karawang	51.57	22.90	25.54
16	Bekasi	53.42	8.58	38.00
17	Bandung Barat	52.12	12.37	35.51
18	Kota Bogor	47.91	0.61	51.48
19	Kota Sukabumi	45.69	4.47	49.84
20	Kota Bandung	46.08	0.93	52.98
21	Kota Cirebon	50.61	2.36	47.02
22	Kota Bekasi	42.73	2.47	54.80
23	Kota Depok	40.13	7.52	52.36
24	Kota Cimahi	50.37	0.42	49.21
25	Kota Tasikmalaya	48.16	8.61	43.24
26	Kota Banjar	45.62	5.32	49.06

\*) termasuk pengangguran dan bukan angkatan kerja

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

### Lampiran 6.

Persentase Pengeluaran Perkapita untuk Makanan Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>64,56</b>	<b>57,23</b>	<b>57,94</b>
1	Bogor	61,11	57,02	57,41
2	Sukabumi	63,45	61,36	61,55
3	Cianjur	67,16	62,10	62,71
4	Bandung	65,36	56,52	57,22
5	Garut	67,91	62,77	63,43
6	Tasikmalaya	66,02	62,88	63,25
7	Ciamis	68,39	61,71	62,29
8	Kuningan	66,03	61,87	62,43
9	Cirebon	66,51	61,76	62,46
10	Majalengka	65,50	61,11	61,73
11	Sumedang	65,08	60,51	61,03
12	Indramayu	66,25	64,43	64,71
13	Subang	65,79	58,83	59,69
14	Purwakarta	68,85	58,16	59,15
15	Karawang	65,41	57,23	58,10
16	Bekasi	63,65	56,18	56,57
17	Bandung Barat	66,08	57,71	58,80
18	Kota Bogor	57,56	52,29	52,72
19	Kota Sukabumi	62,76	55,41	56,00
20	Kota Bandung	58,85	46,71	47,29
21	Kota Cirebon	56,54	53,17	53,52
22	Kota Bekasi	56,74	49,41	49,80
23	Kota Depok	55,94	47,62	47,82
24	Kota Cimahi	59,01	49,61	50,14
25	Kota Tasikmalaya	65,11	56,93	58,33
26	Kota Banjar	59,24	59,21	59,21

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

### Lampiran 7.

Persentase Perempuan Pengguna Alat KB dan Balita di Rumah Tangga Miskin yang Proses Kelahirannya Ditolong oleh Tenaga Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Pengguna Alat KB	Penolong Persalinan Pertama oleh Tenaga Kesehatan	Penolong Persalinan Terakhir oleh Tenaga Kesehatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>74,29</b>	<b>61,02</b>	<b>65,15</b>
1	Bogor	62,04	21,00	26,79
2	Sukabumi	64,84	24,17	49,34
3	Cianjur	70,13	40,23	42,78
4	Bandung	75,81	78,78	80,76
5	Garut	78,62	38,12	39,51
6	Tasikmalaya	76,12	58,99	60,69
7	Ciamis	73,80	87,49	87,49
8	Kuningan	73,88	94,33	100,00
9	Cirebon	68,30	75,17	80,68
10	Majalengka	67,69	80,51	78,38
11	Sumedang	80,24	87,51	86,49
12	Indramayu	85,72	83,02	77,13
13	Subang	77,36	91,72	93,10
14	Purwakarta	77,50	29,99	38,32
15	Karawang	77,08	80,79	89,06
16	Bekasi	74,38	42,81	60,03
17	Bandung Barat	77,38	51,57	50,07
18	Kota Bogor	70,43	53,56	53,56
19	Kota Sukabumi	79,53	65,47	61,78
20	Kota Bandung	90,04	69,79	69,79
21	Kota Cirebon	79,25	100,00	100,00
22	Kota Bekasi	83,49	93,63	97,35
23	Kota Depok	75,18	100,00	100,00
24	Kota Cimahi	85,76	95,02	95,02
25	Kota Tasikmalaya	81,90	78,14	84,63
26	Kota Banjar	83,09	85,91	99,03

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

### Lampiran 8.

Persentase Balita di Rumah Tangga Miskin yang Telah Diimunisasi Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Imunisasi, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	BCG	DPT	Polio	Campak/ Morbili	Hepatitis B
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>88,28</b>	<b>88,39</b>	<b>87,10</b>	<b>72,78</b>	<b>80,65</b>
1	Bogor	74,19	68,17	68,41	51,05	60,26
2	Sukabumi	92,18	89,56	94,56	84,10	83,15
3	Cianjur	88,17	81,29	83,62	68,54	65,75
4	Bandung	98,28	98,28	98,28	85,17	95,50
5	Garut	98,54	96,28	93,38	72,88	93,22
6	Tasikmalaya	76,10	85,47	81,35	64,79	69,65
7	Ciamis	97,37	97,37	97,37	87,18	97,37
8	Kuningan	100,00	100,00	92,63	80,30	96,39
9	Cirebon	87,09	90,38	85,26	85,26	87,77
10	Majalengka	98,08	100,00	98,08	82,80	98,08
11	Sumedang	100,00	100,00	100,00	83,36	95,70
12	Indramayu	97,26	95,53	96,76	77,22	79,87
13	Subang	92,45	86,04	86,04	80,64	92,45
14	Purwakarta	55,80	47,21	57,77	45,24	44,22
15	Karawang	88,81	86,56	89,66	64,36	66,53
16	Bekasi	47,75	75,17	52,62	54,82	44,14
17	Bandung Barat	96,85	96,85	96,85	90,41	86,93
18	Kota Bogor	97,28	97,28	97,28	77,74	94,37
19	Kota Sukabumi	100,00	100,00	96,31	76,19	87,34
20	Kota Bandung	81,66	92,57	81,66	67,40	77,69
21	Kota Cirebon	98,87	98,87	100,00	71,20	100,00
22	Kota Bekasi	89,33	89,33	89,33	72,46	92,61
23	Kota Depok	100,00	100,00	100,00	70,19	100,00
24	Kota Cimahi	100,00	97,14	97,14	73,35	97,14
25	Kota Tasikmalaya	79,50	82,00	89,12	55,34	75,72
26	Kota Banjar	100,00	100,00	100,00	98,49	100,00

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

### Lampiran 9.

Persentase Rumah Tangga Miskin Menurut Kabupaten/Kota  
dan Luas Lantai Perkapita, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Luas Lantai Perkapita (m <sup>2</sup> )		
		≤ 8	8 < Luas ≤ 15	> 15
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>40,90</b>	<b>41,19</b>	<b>17,91</b>
1	Bogor	52,81	41,69	5,50
2	Sukabumi	61,37	27,15	11,48
3	Cianjur	36,91	43,97	19,12
4	Bandung	61,27	31,93	6,80
5	Garut	48,89	37,38	13,73
6	Tasikmalaya	50,47	29,55	19,98
7	Ciamis	20,83	41,72	37,45
8	Kuningan	9,37	62,17	28,46
9	Cirebon	19,90	37,28	42,83
10	Majalengka	25,35	42,21	32,43
11	Sumedang	42,12	38,66	19,22
12	Indramayu	21,47	59,81	18,73
13	Subang	39,09	43,37	17,53
14	Purwakarta	28,94	59,22	11,83
15	Karawang	31,25	55,46	13,29
16	Bekasi	44,80	44,40	10,80
17	Bandung Barat	50,74	43,14	6,12
18	Kota Bogor	45,79	41,63	12,58
19	Kota Sukabumi	69,24	23,88	6,88
20	Kota Bandung	67,04	27,00	5,96
21	Kota Cirebon	40,26	42,90	16,84
22	Kota Bekasi	50,70	32,14	17,16
23	Kota Depok	47,73	47,87	4,40
24	Kota Cimahi	80,57	17,73	1,70
25	Kota Tasikmalaya	33,89	29,55	36,56
26	Kota Banjar	40,54	57,27	2,19

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

### Lampiran 10.

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Air Bersih\*) Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>44,13</b>	<b>65,20</b>	<b>63,62</b>
1	Bogor	32,19	53,84	52,34
2	Sukabumi	24,99	39,37	38,43
3	Cianjur	20,68	42,95	40,80
4	Bandung	48,61	72,59	71,06
5	Garut	37,76	51,54	50,15
6	Tasikmalaya	15,37	38,54	36,38
7	Ciamis	40,48	49,18	48,55
8	Kuningan	41,63	54,42	53,09
9	Cirebon	50,84	64,67	63,02
10	Majalengka	57,99	71,89	70,29
11	Sumedang	47,18	60,20	58,97
12	Indramayu	81,36	81,55	81,53
13	Subang	56,44	60,90	60,49
14	Purwakarta	25,26	57,84	55,38
15	Karawang	35,30	68,80	65,94
16	Bekasi	62,16	87,84	86,90
17	Bandung Barat	28,31	50,34	48,20
18	Kota Bogor	69,28	74,61	74,30
19	Kota Sukabumi	37,82	68,77	67,03
20	Kota Bandung	78,04	89,97	89,59
21	Kota Cirebon	92,95	93,75	93,69
22	Kota Bekasi	65,88	89,64	88,57
23	Kota Depok	43,22	76,24	75,60
24	Kota Cimahi	61,10	84,45	83,44
25	Kota Tasikmalaya	47,34	74,58	70,59
26	Kota Banjar	32,59	83,31	80,84

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

\*) Air bersih meliputi : air kemasan bermerk, air isi ulang, leding meteran, leding eceran, serta sumur bor/pompa, sumur terlindung, dan mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan kotoran terdekat sejauh lebih dari 10 m

### Lampiran 11.

Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Jamban Sendiri/Bersama Menurut Kabupaten/Kota dan Status Miskin, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Miskin	Tidak Miskin	Miskin + Tidak Miskin
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>65,00</b>	<b>86,03</b>	<b>84,45</b>
1	Bogor	43,46	82,64	79,94
2	Sukabumi	48,56	75,31	73,56
3	Cianjur	63,67	80,28	78,68
4	Bandung	78,44	87,54	86,96
5	Garut	55,85	75,29	73,34
6	Tasikmalaya	48,72	70,36	68,35
7	Ciamis	54,35	80,52	78,63
8	Kuningan	91,06	93,42	93,18
9	Cirebon	64,03	82,79	80,55
10	Majalengka	76,26	90,80	89,13
11	Sumedang	85,60	92,19	91,57
12	Indramayu	77,73	87,71	86,64
13	Subang	60,59	80,78	78,93
14	Purwakarta	72,47	92,67	91,14
15	Karawang	32,70	75,59	71,92
16	Bekasi	42,10	86,44	84,82
17	Bandung Barat	90,55	93,85	93,53
18	Kota Bogor	88,70	94,94	94,58
19	Kota Sukabumi	55,83	94,29	92,13
20	Kota Bandung	86,62	97,02	96,68
21	Kota Cirebon	93,40	98,73	98,32
22	Kota Bekasi	96,93	99,82	99,69
23	Kota Depok	100,00	99,53	99,54
24	Kota Cimahi	91,33	96,98	96,74
25	Kota Tasikmalaya	65,73	82,85	80,34
26	Kota Banjar	72,62	81,48	81,05

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

## Lampiran 12.

Persentase Rumah Tangga Miskin yang Mendapatkan Instrumen Penanggulangan Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	BSM SD/SMP	Jamkesmas	PNPM	KUR
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>11,63</b>	<b>54,33</b>	<b>2,04</b>	<b>0,55</b>
1	Bogor	5,99	52,66	0,96	-
2	Sukabumi	14,80	67,42	4,28	3,54
3	Cianjur	19,20	49,00	-	-
4	Bandung	7,36	46,31	2,70	-
5	Garut	19,80	45,50	0,82	-
6	Tasikmalaya	22,31	59,38	7,06	1,87
7	Ciamis	6,09	54,49	1,54	3,38
8	Kuningan	8,57	49,11	4,34	1,14
9	Cirebon	2,77	68,86	-	-
10	Majalengka	18,19	47,55	2,65	0,60
11	Sumedang	10,83	70,05	3,07	-
12	Indramayu	20,87	55,01	1,55	-
13	Subang	8,69	41,34	-	-
14	Purwakarta	8,19	54,88	15,97	-
15	Karawang	10,65	59,18	1,99	0,99
16	Bekasi	-	53,26	-	-
17	Bandung Barat	11,63	50,41	1,38	-
18	Kota Bogor	14,86	57,49	-	-
19	Kota Sukabumi	26,95	84,32	9,00	9,00
20	Kota Bandung	7,47	49,14	-	-
21	Kota Cirebon	14,95	79,44	10,90	-
22	Kota Bekasi	9,16	48,76	-	-
23	Kota Depok	22,24	32,73	-	-
24	Kota Cimahi	13,22	38,76	0,00	0,00
25	Kota Tasikmalaya	2,97	66,91	2,22	0,00
26	Kota Banjar	2,86	46,43	0,00	0,00

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013

### Lampiran 13.

Persentase Rumah Tangga yang Pernah Membeli Beras Raskin dan Rata-rata Beras Raskin yang Diperoleh Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2013

No.	Kabupaten/Kota	Ruta Penerima Raskin (%)	Rata-rata Raskin (kg)
(1)	(2)	(3)	(4)
	<b>JAWA BARAT</b>	<b>78,90</b>	<b>5,09</b>
1	Bogor	61,78	5,36
2	Sukabumi	80,67	6,22
3	Cianjur	87,00	6,35
4	Bandung	91,24	4,16
5	Garut	84,80	4,58
6	Tasikmalaya	92,29	5,83
7	Ciamis	81,73	5,38
8	Kuningan	77,28	6,91
9	Cirebon	98,81	4,41
10	Majalengka	92,95	4,41
11	Sumedang	87,51	4,68
12	Indramayu	92,46	3,82
13	Subang	90,24	3,87
14	Purwakarta	75,83	6,03
15	Karawang	85,80	4,20
16	Bekasi	65,14	6,29
17	Bandung Barat	85,49	3,99
18	Kota Bogor	78,76	6,28
19	Kota Sukabumi	81,56	8,57
20	Kota Bandung	69,71	4,06
21	Kota Cirebon	84,01	4,33
22	Kota Bekasi	56,74	6,11
23	Kota Depok	53,47	5,74
24	Kota Cimahi	60,91	6,35
25	Kota Tasikmalaya	90,59	5,33
26	Kota Banjar	83,30	3,88

Sumber : BPS RI, diolah dari Susenas Kor 2013



# **DATA**

**MENCERDASKAN BANGSA**



Jl. Entjep Kartawiria No. 20 B Citeureup Cimahi 40512  
Telp/Fax. (022) 6645985, web site: [Cimahikota.bps.go.id](http://Cimahikota.bps.go.id)  
e-mail: [bps3277@bps.go.id](mailto:bps3277@bps.go.id)